

BAB III

PANDANGAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG

PARTAI POLITIK ISLAM

Setelah mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai karya-karya Nurcholish Madjid beserta referensi terkait lainnya. Maka dapat dilihat bahwa gagasan-gagasan pemikiran Nurcholish Madjid yang fenomenal menjadikan Nurcholish Madjid sebagai salah satu tokoh pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Bab ini akan membahas lebih rinci dan detail mengenai pandangan politik Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam.

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi khususnya demokrasi multi partai, partai politik Islam memiliki daya tarik yang khas untuk diteliti. Adapun corak partai politik di Indonesia pada umumnya adalah beraneka ragam terlihat dari platform ideologinya seperti Islam, Pancasila dan Nasionalis. Dalam kajian ini penulis akan mendalami lebih jauh fenomena partai politik Islam melalui pandangan politik Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam.

Sebagaimana dengan adanya partai politik Islam yang lahir pada awal kemerdekaan Republik Indonesia (RI), lahirnya partai politik Islam dengan adanya pemberitahuan serta himbauan kepada rakyat Indonesia untuk segera mendirikan partai politik untuk melengkapi dan mengontrol jalannya pemerintahan, maka lahirlah partai-partai politik Islam maupun partai yang bukan berideologi Islam. Seiring perjalanan partai politik Islam pada masa Pemilu awal 1955 hingga sekarang, tentu terdapat perbedaan. Maka dari itu perbedaan-

perbedaan tersebut yang menjadi persoalan kalangan umat sebagai pelajaran sejarah partai politik Islam.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada zaman berdirinya partai politik Islam, dimulai pada Pemilu 1955, Orde Baru, hingga Reformasi merupakan acuan melihat perjalanan partai politik Islam. Nurcholish Madjid merupakan sosok pembaharu, yang melontarkan perkataan Islam yes, partai Islam no. Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan sebagian kalangan pendukung partai politik Islam maupun para politisi partai-partai Islam ketika partai politik Islam hanya sekedar nama Islam yang tidak sesuai dengan substansi Islam itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan Cak Nur mengatakan bahwasanya partai politik Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Dalam menghadapi fenomena-fenomena tersebut untuk mengetahui pandangan politik Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam, ada tiga pokok pembahasan yang akan dikaji lebih mendalam sesuai dengan tulisan dan pandangan mengenai Nurcholish Madjid. *Pertama*, mengenai politik dan agama, *kedua*, mengenai problema partai politik Islam di Indonesia dan yang *ketiga*, masa depan partai politik Islam.

A. Politik dan Agama

a. Politik dan Agama

Berbicara politik dan agama tentu menjadi penting untuk mengkaji suatu pemikiran mengenai partai politik Islam, dimana Islam merupakan agama sedangkan partai politik Islam merupakan kegiatan politik. Sebagian besar

masyarakat merasa dan mengetahui, atau bahkan meyakini hubungan agama dan politik dalam Islam sudah sangat jelas, yaitu bahwa antara keduanya terkait erat secara tidak terpisahkan, sekalipun dalam segi pendekatan teknis dan praktis dapat dibedakan. Agama adalah wewenang *shahih al-syari'ah* (pemilik syariah) yaitu Rasulullah, melalui wahyu atau berita suci yang diterimanya dari Allah Swt. Sedangkan masalah politik adalah bidang wewenang kemanusiaan, khususnya sepanjang menyangkut masalah-masalah teknis struktural dan prosedural.¹⁵⁴

Begitupun mengenai politik, sudah dijelaskan di awal pendahuluan arti politik menurut Miriam Budiardjo yaitu meliputi kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), pembagian (*distributions*), alokasi (*allocation*) dan negara (*state*).¹⁵⁵ Jadi ilmu politik berkaitan dengan konsep kenegaraan dan masyarakat, yaitu tentang bagaimana menciptakan keadaan sosial yang lebih baik.

Berbicara tentang agama memerlukan suatu sikap ekstra hati-hati, sebab sekalipun agama merupakan persoalan sosial, tetapi penghayatan agama amat sangat bersifat individual. Apa yang dipahami dan apalagi yang dihayati sebagai agama oleh seseorang amat banyak bergantung pada keseluruhan latar belakang dan kepribadiannya.¹⁵⁶ Maka dari itu perlu kesepakatan dalam memahami agama dengan penganut-penganut agama.

¹⁵⁴ Budhi Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jilid 1, Jakarta : Democracy Project 2011, Hal 52

¹⁵⁵ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, Hal 9

¹⁵⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Kemordenan dan KelIndonesiaan*, Bandung: Mizan 1991, Hal 121

Tetapi, kita tidak dapat menghindari untuk terlebih dahulu memahami definisi agama. Disebabkan pemahaman dan penghayatan yang individual tersebut, maka terdapat pula bermacam-macam definisi. Professor Wallace mengatakan bahwa agama ialah "suatu kepercayaan tentang makna terakhir alam raya". E.S.P. Haynes berpendapat bahwa agama ialah "suatu teori tentang hubungan manusia dengan alam raya". Bagi John Morley, agama adalah "perasaan kita tentang kekuatan-kekuatan kita tertinggi yang menguasai nasib umat manusia". Dan James Martineau mendefinisikannya sebagai "kepercayaan tentang Tuhan yang abadi, yaitu tentang Jiwa dan Kemauan Ilahi yang mengatur alam raya dan berpegang pada hubungan-hubungan moral dengan umat manusia". Sedangkan seorang ahli filsafat terkenal, Professor Mc Taggart berkata: "agama adalah sudah jelas merupakan suatu keadaan kejiwaan, ia dapat digambarkan secara paling baik sebagai perasaan yang terletak diatas adanya keyakinan kepada keserasian antara diri kita sendiri dan alam raya secara keseluruhan".¹⁵⁷

Agama juga merupakan suatu keyakinan. Dalam hal ini Cak Nur memandang agama bersifat universal. Begitu juga Islam adalah agama yang bersifat universal. Cak Nur melihat umat Islam sangat plural (beraneka ragam) dalam bentuk berbeda-beda. Pluralitas itu mulai dari etnis, ras, suku dan lain sebagainya. Pluralisme tersebut tidak memaknai semua agama sama, seperti anggapan orang awam yang belum mengetahui secara utuh. Cak Nur memandang plural adalah suatu sikap landasan yang positif untuk menerima kemajemukan

¹⁵⁷ Ibid

dalam semua hal tersebut yang dikaitkan dengan kehidupan sosial, baik politik, budaya dan agama.

Orientalis Islam juga telah menjelaskan hubungan agama dan politik tidak bisa dipisahkan, hal itu terkait dengan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia, yang disebut *Habluminallah* dan *Habluminannas*. *Habluminallah* yang diartikan berhubungan dengan Allah “Tuhan yang Esa” adalah hubungan yang bersifat transenden, yang berkaitan dengan hubungan ritualisme keagamaan (shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya). *Habluminannas*, berhubungan dengan sesama manusia, yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial (sejarah, politik, budaya dan kehidupan sosial lainnya).

Nurcholish Madjid juga beranggapan bahwa Islam adalah agama yang benar. Hal itu dituliskannya dalam bukunya yang berjudul “Pintu-Pintu Menuju Tuhan”. Di dalam buku itu ia mengatakan: Islam artinya pasrah sepenuhnya (kepada Allah). yaitu sikap yang menjadi inti ajaran agama yang benar disebut Islam. Begitulah. Kitab Suci mengatakan bahwa Nabi Nuh megajarkan Islam (QS. Yunus/10:72). Nabi Ibrahim pun membawa ajaran Islam, dan mewasiatkan ajaran itu kepada anak-turunnya. termasuk kepada anak-turun Ya’qub atau Isra’il (QS. Al-Baqarah/2:130-132).¹⁵⁸ Ia menjelaskan dengan berpedoman yang bersumber Al-Qur’an. sehingga tidak diragukan lagi penjelasannya.

Namun. dalam ajaran agama bahwa didunia ini orang juga harus berpegang kepada “tali hubungan sesama manusia”. Biasanya ini diartikan

¹⁵⁸ Nurcholish Madjid, *Pintu Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta Dian Rakyat 2005, Hal 3

sebagai dimensi sosial hidup ini. Dalam dimensi sosial itu manusia diperintahkan untuk menggalang kerja sama berdasarkan kebaikan (*al-birr*) dan takwa atau keinsafan ketuhanan. Juga diingatkan orang harus waspada terhadap malapetaka yang tidak menimpa orang-orang jahat saja, melainkan dapat menimpa orang-orang baik juga. Dalam jargon keagamaan, akibat buruk suatu dosa di dunia ini, tidak hanya individual, tapi juga sosial, meskipun dosa itu, dari segi pelakunya bersifat individual.¹⁵⁹

Jadi agama dan politik sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial, sehingga untuk mewujudkan suatu nilai-nilai yang bersifat kebaikan dalam masyarakat, maupun diranah pemerintahan tidak terlepas dari nilai keagamaan secara murni yang hakiki kebenarannya, tidak terlepas dari pengaruh yang mencerminkan keburukan "negatif" sehingga dapat menghambat nilai sosial yang berdampak buruk dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu hubungan dan politik sesuai dengan pemaknaan bagaimana mentafsirkannya dalam nilai-nilai kebaikan dilingkungan sosial. Dalam hal ini Nurcholish Madjid selalu menyoroti tentang umat Islam yang lebih mayoritas secara kuantitas, hingga ini menjadi perenungan bagaimana yang secara kuantitas bisa berkualitas dalam hal pembaharuan yang akan mewujudkan persatuan.

Begitu juga dengan lahirnya gagasan "Sekularisasi". Sekularisasi yang diartikan oleh Fazlur Rahman adalah "Proses pemakaian hukum-hukum dan lembaga-lembaga sosial politik tanpa rujukan agama Islam, yakni bersumber dari atau ada kaitanya dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi".

¹⁵⁹ Ibid

Lahirnya gagasan sekularisasi Cak Nur tidak terlepas dari pemikirannya yang berpatokan modern. Sekularisasi bukan berarti sekularisme (pemisahan agama dari negara seperti yang dianut Amerika). Sekularisasi secara arti sosiologi mengandung pembebasan, yaitu pembebasan dari sikap pensucian yang tidak pada tempatnya. Karena itu, ia mengandung makna desakralisasi, yaitu pencopotan dari ketabuan dan kesakralan dari objek-objek yang semestinya tidak tabu dan tidak sakral.¹⁶⁰ Jadi jelas arti tentang sekularisasi tidak semata-mata untuk mensakralkan yang tidak kita ketahui kebenarannya.

b. Aliran dan Paham Islam di Indonesia

Sejalan dengan perkembangan zaman, sebagaimana kita ketahui umat Islam di Indonesia yang beraneka ragam, mengakibatkan munculnya banyak organisasi dan gerakan pemikir Islam yang mempunyai ideologi masing-masing. Dari kondisi tersebut lahirlah gagasan-gagasan aliran dan paham Islam di Indonesia, yang salah satunya Nurcholish Madjid yang dipandang merupakan tokoh.

Dalam hal ini Syarif Hidayatullah yang menuliskan dan megklasifikasikan aliran dan paham Islam di Indonesia.¹⁶¹ Sebagai berikut:

1. Islam Tradisional

Islam tradisional ini berkembang di pedesaan. umat muslim yang lebih cenderung tinggal di pedesaan sehingga tidak ingin berkembang

¹⁶⁰ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jilid 4, Jakarta: Democracy Project 2012 Hal 2969

¹⁶¹ Syarif Hidayatullah, *Islam "Isme-Isme" Aliran dan Paham Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 Hal 47

secara modern dan lebih rasional. Ia sangat mengabaikan kehidupan yang bersifat duniawi, dalam hal ini lebih bercirikan paham "*ahlusunnah wal jama'ah*" dan lebih menganut empat madzhab. Dalam hal ini adalah Ormas Islam NU (Nahdatul Ulama) yang tinggal di pedesaan dan Kiainya mendirikan pesantren-pesantren sebagai wadah pendidikan ke Islamannya.

2. Pribumisasi Islam

Pribumisasi Islam ini lebih di populerkan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), yang merupakan gagasan awalnya. Dalam gagasan ini tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing.¹⁶² Pelaksanaan konkritnya menasionalkan perjuangan Islam, dengan harapan tidak ada lagi kesenjangan antara kepentingan umat Islam dan kepentingan nasional.

3. Islam Liberal

Lahirnya gagasan Islam liberal tidak terlepas dari salah satu tokoh penggagas Jaringan Islam liberal (JIL) yang bernama Ulil Absar Abdallah (Lakpesdam NU). Ia menegaskan bahwa, Islam liberal yang diperjuangkan oleh JIL adalah dimensi kebebasan dalam Islam yang sangkarnya adalah "niat" atau dorongan-dorongan emotif-subjektif dalam manusia itu sendiri. Karenanya kata liberal dalam "Islam

¹⁶² Ibid

liberal” semestinya dipahami dalam kerangka semacam itu sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan kebebasan tanpa batas, dengan sikap permisif yang melawan kecendrungan “instrinsik” dalam akal manusia itu sendiri.¹⁶³

Pemahaman Islam liberal ini sendiri membuat sebagian kaum muslim di Indonesia menjadi kontra, karena pemahaman “liberal” yang mereka artikan adalah kebebasan tanpa batas. Yang melanggar dari ajaran ajaran Islam. Cak Nur sempat mengkampanyekan Jil ini di khalayak sehingga ia pernah di isukan sebagai tergabung di jaringan Islam liberal.

4. Islam Post-Tradisional

Islam post tradisional, bisa dibilang sebagai kaum muslim di pedesaan mencoba melompat tradisi, dari tradisional ke modern. Hal ini dapat terlihat dari warga NU yang tinggal di pedesaan melakukan transmigrasi (perpindahan) ke kota. Dari sinilah ia mencoba memahami kehidupan yang modern.

Post tradisional menurut Marzuki Wahid¹⁶⁴, intelektual muda NU yang berada di garda aliran pemikiran ini, dapat dipahami sebagai suatu gerakan “lompat tradisi”, karena berangkat dari suatu tradisi yang secara terus-menerus berusaha memperbarui tradisi tersebut dengan cara mendialogkan dengan modernitas.

¹⁶³ Ibid

¹⁶⁴ Ibid

5. Islam Radikal dan Islam fundamentalis

Lahirnya Islam radikal tidak terlepas dari problematika dalam negara dan agama. Dimana paham keagamaan harus di dasari nilainya dari awal, dan terjadinya benturan antara modernitas dan nilai-nilai keagamaan. Terkadang fundamental juga sering diartikan kekerasan. Fundamentalisme itu sendiri bisa bersifat moderat dan radikal. “bagi fundamentalis radikal, menjadikan tauhid sebagai pembenaran bagi pendorinasian terhadap yang lain; adapun fundamentalis moderat, menjadikan tauhid bukan untuk mendominasi yang lain”.¹⁶⁵

Lebih-lebih lagi perkataan fundamental itu sebenarnya tidak tepat untuk gejala Islam, karena perkataan itu muncul di Amerika pada kalangan kaum Kristen sekitar tahun 1920an dengan ciri anti intelektual dan anti ilmu dan menolak keras teori ilmiah mutakhir saat itu.¹⁶⁶

Gagasan Islam radikal berkembang di Indonesia melalui buku-buku Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb dan lainnya. Gerakan fundamentalis Islam terbesar di Indonesia adalah gerakan Tarbiyah yang bergerak melalui masjid-masjid kampus, yang dinamai ketika itu Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

¹⁶⁵ Ibid

¹⁶⁶ Budhy Munawar-Rachman, *ensiklopedi Nurcholis Madjid*, jilid 2, Jakarta: Democracy Project 2012, Hal 1146

6. Islam Transformatif

Islam transformatif dikembangkan dan dipopulerkan oleh Moeslim Abdurrahman yang merupakan gerakan pemikir Islam. Ia merupakan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) yang merepresentasikan mazhab kritis terhadap modernitas, di mana teori-teori kritis dipinjam dari barat. Penggunaan teori-teori sosial kritis digabungkan dengan hermeneutika teks dan sosial itu, digunakan sebagai pisau analisis dalam mendialogkan doktrin Islam dengan problem modernitas. Hasilnya, Islam Islam transformatif lebih menyuarakan kepentingan kelompok yang termarjinalkan dan teraniaya akibat modernisasi, ketimbang mempromosikan modernisasi.¹⁶⁷

Di sini lebih menekankan pada perlu pemahaman terhadap agama. selama ini pemahaman agama hanya sebagai media penghambaan kepada tuhan (teosentrik) saja. Padahal kita beragama juga perlu melihat realitas keadaan sosial. Sebagaimana yang diorientasikan untuk manusia, maka kita perlu melihat kebutuhan manusia itu sendiri.

7. Islam Modernis, Islam Moderat

Seiring dengan perkembangan munculnya gelombang pembaruan pemikir Islam yang bermula di Timur Tengah pada awal abad ke 19. Pada saat yang sama pemikir-pemikir Islam juga bermunculan di Asia

¹⁶⁷ Syarif Hidayatullah, *op. cit.*, Hal 90

Tenggara. Munculnya Muhammadiyah merupakan bukti nyata mengenai proses pembaharuan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Modernisasi pendidikan dengan cara-cara mengadopsi model pendidikan Barat adalah salah satu dari produk gerakan pembaruan Muhammadiyah.¹⁶⁸

Dalam konteks ini Islam moderat bertugas mencairkan kebekuan pemikiran Islam dengan menampilkan Islam dalam tema perdamaian, dialog dan toleransi. Tampaknya, Islam moderat bila ditinjau dari pilihan atas doktrin *amar ma'ruf nahi mungkar*, pilihannya lebih terletak pada *amar ma'ruf* (menyeru kepada kebaikan). Maka, lebih dialogis dan persuasif ketimbang kekerasan.¹⁶⁹

Walaupun pemikiran pembaruan Islam berkembang di Timur Tengah, di Indonesia terjadinya perubahan arah dari gelombang Islamisasi negara yang dimainkan oleh kekuatan Islam politik menjadi de-Islamisasi negara yang dipelopori oleh sayap Islam kultural semacam Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid di era Orde Baru.¹⁷⁰ Cak Nur merupakan pelopor di negrinya sendiri untuk pemahaman secara pembaruan.

8. Islam Neo-Modernis

Islam Neo-modernis adalah sebuah gerakan pemikiran Islam yang diperkenalkan pertama kali secara sistematis oleh Fazlur Rahman, seorang toko pembaru pemikiran Islam kontemporer asal Pakistan. Di

¹⁶⁸ Ibid

¹⁶⁹ Ibid

¹⁷⁰ Ibid

Indonesia di perkenalkan oleh dua murid Fazlur Rahman di Chicago, AS, yaitu: Nurcholish Madjid dan Ahmad Syafii Maarif, ketika keduanya kembali ke tanah air pada awal 1980an.¹⁷¹

Neo-modernisme yang di *launching* Fazlur Rahman ini adalah gagasan pemikiran Islam progresif yang muncul dari modernisme Islam namun mencakup aspek-aspek tradisionalisme Islam. Karenanya, gerakan ini memiliki empat ciri pokok, yaitu: *Pertama*, penafisiran Al-Qur'an yang sistematis dan komprehensif. *Kedua*, penggunaan metode heremeneutika dan kritik historis. *Ketiga*, melakukan pembedaan secara jelas antara normativitas Islam dan historisitas Islam. Dan *keempat*, penggabungan unsur-unsur tradisionalisme dan modernisme Islam.¹⁷²

9. Islam Inklusif

Salah satu penggagas Islam Inklusif adalah Alwi Shihab yaitu pemegang dua gelar doktor dari Universitas 'Ain Syams, Mesir dan Universitas Temple, Amerika Serikat. Ia mengemukakan bahwa yang menyebabkan perselisihan yang telah mewujud dalam sejarah hubungan Muslim-Kristen sejak kedatangannya di Indonesia pada dasarnya terletak pada sejarah panjang saling tidak percaya dan ketiadaan sikap saling terbuka.¹⁷³

Pada dasarnya ia menegaskan tentang keagamaan, dimana masing-masing agama mempunyai nilai sendiri. Ia juga memahami dengan

¹⁷¹ Ibid

¹⁷² Ibid

¹⁷³ Ibid

adanya toleransi dan pluralisme yang harus diterapkan sehingga tidak ada perpecahan antara umat manusia. Islam juga harus memahami masing-masing agama yang mutlak, mempunyai nilai yang sama.

B. Problema Partai Politik Islam di Indonesia

1. Perjalanan Partai Politik Islam

Umat Islam merespon atas keluarnya himbauan pemerintah tentang pendirian partai politik yang bertujuan untuk keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan politik, sehingga berdirilah partai pertama yang berasaskan Islam dari kalangan umat Islam yang bernama Masyumi (pada tahun 1945). Lahirnya partai politik Islam tentu mempunyai tujuan sebagai wadah kaum muslimin untuk melakukan kegiatan politiknya. Maka melalui partai politik sebagai wadah atau penggerak dalam mengontrol dan mengaspirasikan masyarakat hingga ketatanan pemerintahan.

Dalam sejarah politik Indonesia, di kalangan pemikir Islam mengalami perdebatan tentang suatu hal yang sangat fundamental, mengenai perlukah umat Islam mendirikan partai politik Islam? Pertanyaan ini di satu sisi, ada kelompok yang menolak dibentuknya partai Islam yang di wakili oleh pemikiran Nurcholish Madjid alias Cak Nur. Di sisi lain, ada kelompok yang sangat keras memperjuangkan perlunya kelahiran partai Islam sebagai alat perjuangan dan aspirasi kaum

muslim untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang menurut mereka sesuai dengan kehidupan umat di dalam sebuah negara.¹⁷⁴

Cak Nur sangat berperan ketika itu untuk menentang berdirinya partai politik Islam, karena yang di fikiran Cak Nur bagaimana partai politik Islam tidak sekedar untuk mencari suara di pemenangan Pemilu. Kita lihat saja hasil Pemilu pertama pada tahun 1955. Pada tahun 1955 merupakan awal perdana Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, namun sayang partai Islam tidak memperoleh suara yang signifikan. Pemilu yang di ikuti enam partai politik Islam diantaranya: Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI dan AKUI. Hanya memperoleh suara 20,9% untuk Masyumi, NU memperoleh suara 18,4%, PSII memperoleh suara 2,0%, Perti memperoleh suara 1,3% dan PPTI dan AKUI masing-masing memperoleh suara 0,2%.¹⁷⁵ Ini merupakan hasil suara pada pemilihan umum awal. Bagaimana dengan selama Pemilu era Orde Baru yang terselenggara enam kali pemilihan umum yang terhitung tahun 1971, 1977, 1982, 1987,1992 dan 1997.

Perjalanan partai politik Islam selama Orde Baru telah melaksanakan enam kali pemilihan umum, juga tingkat prolehan suara tidak begitu signifikan. Pada pemelihan umum 1977, partai politik Islam berfusi menjadi PPP yang mewakili kelompok muslim yang terdiri dari Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti.¹⁷⁶ Namun disayangkan tidak juga memperoleh suara yang signifikan. Walaupun partai Islam berfusi menjadi

¹⁷⁴ Ridho Alhamdi, *op.cit.*, Hal 5

¹⁷⁵ Lili Romli, *op.cit.*, Hal 2

¹⁷⁶ Ridho Alhamdi, *op.cit.*, 81

tiga partai, yang seharusnya menambah hasil suara dan nyatanya partai yang bukan Islam lebih unggul. Berikut ini hasil prolehan suara pemilu 1977:

Tabel 1 Hasil Prolehan Suara Pemilu 1977

Nama Partai	Suara	Prosentase (%)	Jumlah Kursi
PPP	18.743.491	29,3	99
Golkar	39.750.096	62,1	232
PDI	5.504.757	8,6	29
TOTAL	63.998.344	100,0	360

Sumber : Diolah dari Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, 2013, Hal 82

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil suara pemilihan umum partai politik Islam tidak unggul di bandingkan partai politik yang bersifat nasionalis seperti Golkar. Ketika itu juga lahirah gagasan Nurcholish Madjid yang mengatakan “Islam Yes, Partai Islam No”, perkataan tersebut tidak terlepas dengan kekecewaan Cak Nur melihat partai politik Islam. *Pertama*, ia beranggapan bahwa partai politik Islam hanya formalistik, tidak secara substansi (nilai-nilai ke Islaman). *Kedua*, Islam di jadikan sebagai ideologi.

Karena salah satu apologia yang paling berat ialah percobaan mereka untuk mengajukan Islam dan memandang secara langsung sebagai ideologi politik seperti halnya dan sebanding dengan ideologi-ideologi

yang ada di dunia ini. Memang terdapat kontroversi mengenai apa yang dimaksud ideologi.¹⁷⁷ Cak Nur berpendapat bahwa Islam bukanlah sebuah ideologi, meskipun Islam bisa berfungsi sebagai lahirnya sumber ideologi para pemeluknya.¹⁷⁸ Nurcholish Madjid sendiri mengatakan Islam saja bukan sekedar ideologi tapi bagaimana para pemeluknya mampu untuk memahami Islam. Begitu juga dengan partai politik yang tidak sekedar mengembor-gemborkan keIslamannya.

Karena partai politik merupakan suatu wadah kegiatan politik, Cak Nur mengatakan Islam adalah agama kemanusiaan (*Fitrah*), yang membuat cita-citanya sejajar dengan cita-cita kemanusiaan universal. Cita-cita itu tidak akan berhenti pada satu titik tertentu, sebab salah satu aspek terpenting kemanusiaan adalah perkembangan. Karena sikap perkembangan itu, maka tidak akan ada penyelesaian masalah kemanusiaan sekali untuk selamanya.¹⁷⁹ Maka dari itu partai politik Islam seharusnya tidak sekedar bersifat formalitas yang mengatas namakan Islam.

Nurcholish Madjid juga berharap bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini ialah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia.¹⁸⁰ Partai politik yang merupakan kegiatan politik yang diartikan oleh Sigid Pamungkas dalam bukunya

¹⁷⁷ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam, Era Reformasi*. Jakarta:Paramadina, 1999 Hal 46

¹⁷⁸ Ibid

¹⁷⁹ Ibid

¹⁸⁰ Ibid

“Partai Politik, teori dan praktik di Indonesia” mengatakan: “partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu harus di raih melalui keikut-sertaanya di dalam pemilihan umum”.

Jadi jelaslah gagasan tentang “Islam yes, partai Islam no” seolah-olah ada pemisahan antara urusan agama dan politik. Agama tidak boleh dibawa ke ranah yang praktis sehingga berujung pada konflik antara umat Islam itu sendiri. Adanya pemisahan tersebut, umat Islam akan lebih fokus pada kemaslahatan umat serta urusan lain seperti pendidikan dan sosial. Sedangkan urusan politik diserahkan kepada partai politik yang cenderung menggunakan simbol nasionalis atau moderat tanpa harus mencantumkan asas atau simbol-simbol keIslaman.

Bagaimana dengan masa era reformasi, dimana partai-partai Islam semakin bertambah. Bertambahnya partai politik Islam pada tahun 1998 setelah usainya Orde Baru dan runtuhnya kepemimpinan Soeharto. Dimana Orde Baru yang terkenal dengan kekuasaan sentralistik dan otoriter. Dalam era reformasi partai politik Islam juga tidak begitu banyak mendulang suara dalam pemilihan umum 1999. Ada 17 partai politik Islam yang mengikuti Pemilu 1999. Namun ada dua partai yang lolos *electoral thresold* yaitu PPP dan PBB. Berikut prolehan suaranya:

Tabel 2 Hasil Perolehan Suara Partai Politik Islam Pemilu 1999

Nama Partai	Suara	Prosentase (%)	Jumlah Kursi
PPP	11.329.905	10,72	58
PBB	2.049.708	1,94	13

Sumber: Diolah dari Lili Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006 Hal, 141

Bagaimanapun partai politik Islam berkembang pada tahun 1998, tetapi untuk menjadi mayoritas itu sangat sulit. Terbukti dari Pemilu 1999 ada 17 yang tergabung, namun hanya ada dua partai politik Islam yang lulus *electoral thresold* pada pemilihan umum ini. Begitu juga pada tahun 2004 hanya ada lima partai politik Islam yang lolos diantaranya, PPP, PKS, PBR, PBB dan PBNU. Begitu juga pada tahun 2014 yang sekarang partai politik Islam jumlahnya tetap lima yang mengikuti kontestasi pemilihan umum yaitu: PAN, PPP, PKS, PKB dan PBB.

Ini mengindikasikan bahwa dukungan umat Islam terhadap partai politik Islam terus menurun. Dengan demikian, para elit Islam masih terjebak dengan dalam "mitos politik kuantitas". Pandangan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam akan berbanding lurus dengan sikap pilihannya sehingga dengan serta merta mereka akan

memilih partai Islam.¹⁸¹ Namun tidak sesuai dengan mitos yang tidak sesuai dengan realita.

Mengapa umat Islam tidak semua memilih partai politik Islam, hal ini terjadi karena dikalangan umat Islam telah terjadi perubahan orientasi dalam pandangan politiknya. Akibat modernisasi yang dilakukan pemerintah dan gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid, membawa dampak terhadap cara pandang umat Islam yang tidak lagi terikat dengan simbol-simbol keIslaman, tetapi yang dilihat sejauh mana suatu partai menerapkan nilai-nilai keIslaman. Jadi yang dipentingkan umat Islam adalah substansi bukan formalisme. Mereka tidak melihat label apa yang dipakai suatu partai tetapi lebih dilihat sejauhmana suatu partai memperjuangkan, misal, tentang demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, keterbukaan, dan lain-lain.¹⁸²

Kalau kita melihat sejarah, Nurcholish Madjid merupakan orang yang terlahir dikalangan tradisional pesantren. Kedua orang tuanya merupakan tokoh terkenal yang berafiliasi partai politik Masyumi. Masa kecil Cak Nur yang sempat di kucilkan dari teman-temannya pada awal menjelang Pemilu 1955. Ketika itu juga ibunda Cak Nur yang bernama Hj. Fathonah, aktif sebagai juru kampanye. Akan tetapi, dampak dari sikap politik kedua orang tuanya Cak Nur terasa. Hingga saat ia belajar selalu disindir para pengajar sebagai anak Masyumi yang kesasar.

¹⁸¹ Lili Romli, *op.cit.*, Hal 150

¹⁸² *Ibid*

Saat itu juga Nurcholish Madjid menyampaikan curhatannya kepada ayah dan ibunya, hingga akhirnya di pindahkan ke Jawa Timur (pondok pesantren Gontor). Sebagai anak yang dibesarkan di dalam kultur politik Masyumi, dimana orang tuanya sebagai pendukung setia partai tersebut. Hingga ia pernah memiliki insting untuk membela Masyumi. Jadi wajar ketika Nurcholish Madjid kecil sudah mengetahui kehidupan politik berdasarkan yang ia alami. Partai politik Islam merupakan salah satu yang di naungi keluarganya.

2. Perjuangan Piagam Jakarta

Jika bentuk ideal umat Islam itu beserta tugas kewajibannya untuk kemanusiaan harus diungkapkan dalam kalimat singkat, maka yang paling baik ialah mengutip Al-Qu'an tentang gambaran yang diberikan untuk masyarakat Islam di masa Rasulullah SAW: *"Kamu adalah sebaik-baik umat yang diketengahkan untuk manusia, karena kamu menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan. lagi pula kamu percaya kepada Tuhan."*¹⁸³ Dalam perkataan Cak Nur ini tentu bermakna *amar ma'ruf nahi mungkar* yaitu berbuat baik dan mencegah yang buruk.

Dalam hal ini tidak terlepas dengan pengusulan dasar negara. dari kelompok kaum muslim mengusulkan dasar negara Islam dan golongan kebangsaan mengusulkan dasar negara Pancasila. Kesepakatan golongan

¹⁸³ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Era Reformasi*, Op.cit.,

ini untuk menentukan dasar negara pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang di sebut dengan *Piagam Jakarta*.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam menindaklanjuti, menyepakati antara kedua golongan tersebut untuk mengikuti sidang tersebut. Namun usulan mengandung nilai-nilai Islam di hapuskan karena aspirasi dari umat Islam tidak terpenuhi. Namun dalam tulisan Cak Nur kebaikan konstitusional bagi keseluruhan bangsa kita ialah sistem yang sudah disepakati bersama. Yaitu pokok-pokok yang terkenal dengan Pancasila menurut semangat UUD 45.¹⁸⁴

Karena kita ketahui konstituante adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menyusun UUD baru. Anggota-anggota konstituante terdiri dari partai-partai politik peserta pemilihan umum dan perwakilan dari golongan minoritas. Dari hasil Pemilu 1955 menunjukkan bahwa tidak ada partai politik sebagai pemenang, sehingga partai politik yang duduk dalam konstituante tidak ada yang mayoritas.¹⁸⁵ Sehingga lebih didominasi bukan yang berfikiran untuk mewujudkan asas negara Islam.

Akhirnya persoalan untuk menjadikan asas negara Islam itu tidak mungkin, karena partai-partai Islam hanya memperoleh suara 45%.¹⁸⁶ Dalam musyawarah tentu jumlah dari partai-partai harus memenuhi kuota sehingga dapat memenuhi suara mayoritas. Tapi hal itu tidak mungkin

¹⁸⁴ *Ibid*

¹⁸⁵ Lili Romli, *op.cit.*,

¹⁸⁶ *Ibid*

diraih oleh partai Islam yang jumlahnya sedikit. Hingga akhirnya Cak Nur juga pernah mengatakan kesepakatan golongan untuk membangun masyarakat politik bersama. Demikian sama halnya dengan umat Islam Indonesia yang tidak memandang Pancasila dan UUD 45 itu sebagai alternatif terhadap agama Islam.¹⁸⁷

Jadi bagaimanapun partai politik Islam atau politisi Islam dalam memperjuang "Piagam Jakarta" yang menginginkan asas negara Islam tentu harus menjadi evaluasi untuk melihat kondisi masyarakat di Indonesia yang sangat plural. Oleh karena itu umat, Kaum muslim Indonesia harus melaksanakan hak sah mereka dalam pancasila, yaitu hak untuk memahami dan mengamalkan agama mereka secara sepenuhnya. Kaum muslim dapat mengamalkan pancasila hanya jika mereka memahami dan mengamalkan agama mereka secara benar.¹⁸⁸

Dengan dibubarkan panitia dan dihentikan MPRS dalam membahas masalah ideologi, perjuangan partai-partai Islam tentang Piagam Jakarta gagal kembali. Sebagaimana dikatakan Boland, partai-partai Islam memperjuangkan kembali legalisasi Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945 selama sidang MPRS bulan Maret 1968 tanpa hasil. Partai-partai Islam, dengan demikian masih belum mampu memengaruhi keputusan politik di tingkat nasional. Islam hanya "mayoritas" dalam

¹⁸⁷ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam, Era Reformasi*, op.cit., Hal 58

¹⁸⁸ *ibid*

jumlah tetapi “minoritas” dalam keputusan politik.¹⁸⁹ Begitulah perjuangan partai politik Islam namun belum berhasil.

Penolakan para tokoh Islam tersebut sebenarnya bisa dipahami. Karena memang selama ini mereka, terutama Nurcholish Madjid adalah penentang terhadap kelompok yang menggunakan pendekatan formalistik dalam memperjuangkan Islam di Indonesia. Karena itu, ketika PPP dan PBB mengusulkan Piagam Jakarta dengan serta merta mereka tidak setuju.¹⁹⁰ Islam cukup sebagai sumber etik dan moral dalam kehidupan bernegara. Sehingga Islam hadir untuk mewarnai kehidupan umatnya dalam mewujudkan cita-cita kebaikan dalam sebuah negara.

Beberapa Ormas Islam dan para tokoh Islam seperti Prof. Dr. Nurcholish Madjid, KH. Khasyim Muzadi, Prof. Dr. M. Syafii Ma'arif dan Mardar F. Mas'udi juga tidak setuju Piagam Jakarta masuk kembali pada Pasal UUD 1945¹⁹¹ Cak Nur juga mengatakan dalam hal ini untuk menghindari konflik yang berbau SARA antar umat beragama. Karena menurutnya “ketuhanan” adalah istilah Indonesia yang mengandung prinsip Islam yang paling dasar yaitu tauhid (ke Esaan Allah). Ketika ketauhidan ini hadir dalam masing-masing individu pemeluknya, tidak sekedar harus menjadi asas negara.

¹⁸⁹ Lili Romli, op.cit , Hal 175

¹⁹⁰ Ibid

¹⁹¹ Ibid

C. Masa Depan Partai Politik Islam

a. Konsistensi Partai Politik Islam

Partai politik adalah “kreasi” abad modern dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep politik modern, khususnya demokrasi. Tidak ada sesuatu yang sempurna di bumi. Maka partai politik pun, sebagai instrumen mencapai tujuan bersama, juga tidak bisa difungsikan secara sempurna. Banyak sekali permasalahan yang terkandung pada sistem kepartaian. Namun harus diakui, seperti dikatakan oleh Weiner dan Lapalombara, bahwa partai politik, meskipun banyak sekali mengandung kekurangan dan kelemahan, ia secara keseluruhan masih merupakan instrumen yang sukses untuk menetapkan pemerintahan nasional yang absah.¹⁹²

Nurcholish Madjid mengatakan jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide itu sekarang dalam keadaan tidak menarik.¹⁹³ Jadi bagaimana seharusnya partai Islam itu bisa membangun *image* positif dan simpatik dalam masyarakat. Karena hal ini terlihat dari jumlah umat Islam yang mayoritas namun tidak semua umat Islam menentukan pilihannya terhadap partai Islam.

¹⁹² Budy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jilid 3, Jakarta: Democracy Project, 2012, Hal 2333

¹⁹³ Ibid

Perlu kita ketahui perjuangan muslim yang terbentuk dari organisasi masa dalam artian modern terbentuknya kalangan kaum muslim melalui Sarekat Islam (SI) dan ternyata Sarekat Islam saja tidak hanya menjadi katalisator kebangkitan nasionalisme bercorak Islam saja, tetapi juga yang bercorak Marxis (suatu pertumbuhan dari SI Merah) dan bercorak nasionalisme (tiruan) Barat khususnya menurut gaya Bung Karno yang adalah anak asuhan politik HOS Tjokroaminoto.¹⁹⁴ Kalau sekarang berbentuk partai politik Islam untuk memperjuangkan dalam hal yang berkaitan dengan sosial dan politik.

Begitu juga dengan Eep Saifullo Fatah, misalnya, membagi partai-partai Islam dalam 4 kelompok.¹⁹⁵ *Pertama*, partai politik yang menjadikan komunitas muslim sebagai basis atau target massanya. *Kedua*, partai politik yang memakai label Islam sekalipun tidak berasaskan Islam. *Ketiga*, partai politik yang menjadikan Islam sebagai asasnya. *Keempat*, partai politik yang agenda dan platformnya secara tegas melayani kepentingan dan ideologi kalangan Islam. Dari empat kelompok partai Islam jelaslah mana yang sekedar formalistik dan mana lebih mengedepankan substansialistik.

Partai politik Islam hendaknya tidak menjadikan paradigma kekuasaan sebagai satu-satunya tujuan dan tolok ukur keberhasilan. Sebagaimana diungkapkan oleh almarhum Cak Nur, menjadi oposisi sebetulnya sama

¹⁹⁴ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam, Era Reformasi*, op.cit., Hal 44

¹⁹⁵ Lili Romli, op.cit.,

mulianya dengan duduk di pemerintahan. Bahkan, menjadi oposisi bisa lebih mulia dan mengakar ke bawah. Dari pada duduk di kekuasaan, namun tidak melakukan program yang bermanfaat bagi umat banyak, atau keberhasilan kebijakannya seringkali hanya dipolitisasi parpol tertentu.¹⁹⁶

Bagaimana seharusnya yang dilakukan partai politik Islam, terutama para politisi atau kader partai politik Islam. Seharusnya bisa tampil sebagai “*Muslim Democracy*” sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Vali Nasr.¹⁹⁷ Menurutny “muslim demokrasi” adalah seorang politisasi muslim yang bisa melihat politik dengan kacamata yang pragmatis untuk kepentingan kestabilan negara guna melayani kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Sebagaimana juga Cak Nur mengatakan demokrasi tidak hanya sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan Islam dan Negara Islam. Tetapi bagaimana bisa mewarnai kehidupan dalam kegiatan sosial.

Jadi jelas Cak Nur sangat berkontribusi dalam segala pemikiran, sehingga partai politik Islam harus bisa untuk berkompetisi dalam pemilihan umum dengan adanya konsistensi arah dan tujuan. Tidak sekedar untuk mencari basis masa dan suara, tetapi bagaimana partai Islam dan politisi Islam bisa berfikiran maju untuk mewujudkan nilai kebaikan seluruh umat di negri ini, tanpa harus ada yang mengatakan minoritas akan di kucilkan dengan yang mayoritas.

¹⁹⁶ Ahmad Syafii Maarif, Dkk, *MAARIF Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Ekspresi Politik Umat Islam*, Jakarta: Maarif Institut, Hal 90

¹⁹⁷ Ibid

Dalam hal ini konsep partai politik Islam dalam pandangan Nurcholish Madjid yang meliputi definisi, asas dan tujuan. Dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3 Konsep partai politik Islam menurut Nurcholish Madjid

Partai Politik Islam menurut Nurcholish Madjid	
Definisi	Partai politik Islam adalah partai yang tidak sekedar membawa nilai-nilai Islam tetapi bisa menaungi semua umat yang ada di negeri ini.
Asas	<i>Amr Ma'ruf nahi mungkar</i> dan berpedoman dengan nilai-nilai Al-Qur'an.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai politik Islam mampu memahami nilai-nilai Al-Qur'an dan As Sunnah. 2. Menciptakan demokrasi yang bersih dan masyarakat madani. 3. Partai politik Islam tidak sekedar meraih suara dalam pemilihan umum tetapi menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik.

b. Demokrasi dan Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Berbicara partai politik Islam tidak terlepas dengan pembahasan demokrasi dan masyarakat madani (*Civil Society*) sebagai mana dengan tulisan Cak Nur dalam bukunya “Cita-Cita Politik Islam”. Demokrasi yang dimaksud ialah pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara yang rahasia. Hal ini benar-benar dapat dimengerti, karena hak untuk memberi suara secara bermakna dan bebas dari paksaan merupakan metafor untuk sistem politik yang membuka partisipasi umum.¹⁹⁸ Tidak terlepas dari tugas partai politik Islam yang mengawal untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dalam pemilihan umum yang rahasia. Hal ini tentu partai politik Islam tidak membuat kampanye-kampanye yang mementingkan partainya sendiri.

Dalam hal ini demokrasi tidaklah sekedar dalam Pemilu-Pemilu, melainkan *Civil Society* yang disebut masyarakat madani dimana berbagai macam perserikatan, klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai dan kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara dan negara dan warga negara.¹⁹⁹ Dalam hal ini tentu Cak Nur mengaitkan *civil society* berfungsi jelas dalam sistem-sistem politik yang nantinya akan membuka partisipasi rakyat umum.

Kalau mengutip perkataan dikalangan para ulama terkenal dengan adanya ungkapan bijak, “kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan

¹⁹⁸ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Era Reformasi*, op.cit., Hal 145

¹⁹⁹ Ibid

orang lain” (*Hurriyatul mar’i mahdudatun bihurrayyati siwahu*). Cak Nur mengatakan ungkapan bebas dan bertanggung jawab terdengar kurang simpatik karena sering lebih ditekankan segi bertanggung jawab dari pada segi kebebasannya. Jadi kebebasan harus penuh dengan tanggung jawab sehingga tidak sekedar kebebasan semata. Begitu juga yang dilakukan penguasa dalam melakukan kebebasan untuk apa yang diinginkan dalam kemaslahatan rakyat. Ketika kemaslahatan tidak tepat pada ide nya, maka tanggung jawab tersebutlah yang harus dilakukan.

Dengan kata lain, kewargaan dengan hak dan tanggung jawabnya adalah bagian utuh dari pengertian *civil society*.²⁰⁰ Bagaimana masyarakat madani bisa memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai terpuji. Partai politik Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai yang tidak sekedar untuk kepentingannya, tentu menjadi harapan dan tugas yang harus mejadi tujuan.

Harapan dari demokrasi menurut Cak Nur bagaimana mengembangkan nilai-nilai yang merupakan implikasi masyarakat demokratis seperti hak-hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, tertib dan keadilan hukum, perwujudan dan kesempatan yang merata serta seterusnya.²⁰¹ Karena kita ketahui demokrasi merupakan perkembangan dari masyarakat. Tidak terlepas juga atas kemauan dan keputusan politik pimpinan negara dan kaum terpelajar masyarakat.

²⁰⁰ Ibid

²⁰¹ Ibid

Jika kita masih percaya bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan demokrasi, maka apa ukurannya sehingga kita berani mengatakan seperti itu. Salah satu caranya adalah kita melihat adanya kemajuan dan keadaban demokrasi yang sedang menjadi diskusi dan keinginan banyak pihak tentang demokrasi yang lebih beradab di muka bumi.²⁰² Karena kultur demokrasi yang beradab akan berkembang sebagaimana historik dan sosial yang kuat. Kalau kita meminjam perkataan Robert Hefner yang merupakan antropolog Boston University ia pernah memberikan pengantar tentang akar-akar historis dan kultural demokrasi dalam perkembangan di sebuah negara.

Robert Hefner kemudian memberikan kriteria yang sifatnya normatif, namun sejatinya dapat dilaksanakan dalam dunia nyata, yakni:

“Democratic civility (Demokrasi yang berkeadaban) merupakan demokrasi yang di dalamnya mengindikasikan kebebasan yang terdapat dalam warga negara untuk mengekspresikan pendapat tanpa tekanan, berdirinya dan berkembangnya asosiasi-asosiasi kewargaan yang bersifat suka rela. terdapat lembaga-lembaga kontrol atas lembaga negara, tumbuhnya kelembagaan desentralisasi dan pembagian kerja yang hebat dalam hal pelayanan kesehatan dan tumbuhnya inisiatif-inisiatif ekonomi dalam masyarakat. penegakan hukum yang kuat. kebebasan pers yang tampak disana. tidak terjadi pembredelen media massa. kepemimpinan partai yang mengarahkan partai pada kebaikan publik dan pemerintahan

²⁰² Zuly Qodir, *op.cit.*, Hal 181

yang baik (*good governance*) dan tumbuhnya sistem pemerintahan yang benar-benar memiliki kultur demokratis”.²⁰³

Jadi kalau berkaca perkataan Robert Hefner dikaitkan dalam umat Islam yang ada di Indonesia, melalui perjuangan partai politik Islam dengan mewujudkan masyarakat madani dalam umat Islam. Islam yang dikenal untuk menuju sistem sosial dan ekonomi serta kultur yang manusiawi dan membangun kebaikan dalam masyarakat. Cak Nur juga pernah menjelaskan dalam kehidupan masyarakat bahwa nilai-nilai dalam kemasyarakatan yang terbaik hanya terwujud dalam tatanan hidup yang kolektif dengan memberi peluang pada adanya pengawasan sosial.

Dengan demikian masyarakat madani dan demokrasi yang berkeadaban tentu saling berkaitan, dalam kehidupan sosial, politik, baik itu penegakan hukum seperti keadilan, begitu juga dalam tatanan pemerintahan dengan mewujudkan *good governance*, pelayanan yang baik. begitu juga menciptakan kemakmuran dibidang ekonomi dan sebagainya. Sehingga kehidupan masyarakat saling terbuka satu sama lain. Cak Nur juga pernah mengatakan manusia pada dasarnya baik.

²⁰³ Ibid